

**ANALISIS YURIDIS PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN UNTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN WANITA DEWASA DAN ANAK
(Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

ABSTRAK

Maksum *

Pemeriksaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni bagaimana pengaturan penyidikan Polri terhadap korban tindak pidana pemeriksaan wanita dewasa menurut KUHP dan Qanun di Kepolisian, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeriksaan untuk memenuhi hak-hak korban berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana hambatan dalam penyidikan Polri terhadap korban pemeriksaan di kepolisian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengaturan penyidikan terhadap korban tindak pidana pemeriksaan di kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor 10/Bua.6/Hs/ SP/VIII/2010 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kedudukan Qanun ini dapat diakui dalam hierarki undang-undang di Indonesia yang sejajar dengan perda. Diakuinya Qanun ini artinya Qanun memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeriksaan dalam penyidikan adalah dalam pemeriksaan terhadap korban aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum sampai kepada hakim pada saat pemeriksaan di persidangan masih memperlakukan korban tindak pidana pemeriksaan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus didengar, dihormati, dan dilindungi hak-haknya secara hukum. Hambatan dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pemeriksaan di kepolisian adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan

Kata Kunci : Penyidikan, Perlindungan Hukum, Korban, Pemeriksaan

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF POLRI IN INVESTIGATIONS
FOR LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF ACTIONS CRIMINAL
RAPE OF ADULT WOMEN AND CHILDREN
(Analysis of Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law)
ABSTRACT**

Maksum *

Rape is a very deviant behavior carried out by humans who have crossed the limits of their humanity, even beyond the animal side. At present the crime of rape is a crime that has received sufficient attention in the community. As for the formulation of the problem in this thesis research, namely how to arrange Police investigations into victims of the criminal act of rape of adult women according to the Criminal Code and Qanun in the Police, what forms of legal protection for victims of criminal acts of rape to fulfill the victims' rights based on Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, what are the obstacles in the Police's investigation of rape victims in the police.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and field research. Primary and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

Arrangements for investigating victims of rape in the police are regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Providing Legal Aid Number 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010 and Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The position of this Qanun can be recognized in the hierarchy of laws in Indonesia which is parallel to regional regulations. He acknowledged that this Qanun means that Qanun has binding legal force.

The results of the study are that the form of legal protection for victims of rape in investigations is in the examination of victims of law enforcement officials who are members of the criminal justice system starting from police investigators, public prosecutors to judges during examinations in court still treating victims of rape crimes as an object, not a subject whose rights must be heard, respected and protected by law. Obstacles in investigating victims of rape in the police are that it is difficult for investigators to find the whereabouts of perpetrators who have fled and become fugitives.

Keywords: Investigation, Legal Protection, Victims, Rape

KATA PENGANTAR